

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Atmasasmita Romli. 1975. *Dan Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Alumni. Bandung. *Disadur New Horizonns In Criminology*. Harry Elmer Barnes & Negley K. Teeters.
- _____ & Soemadipradja. 1979. *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung.
- Atmosudirdjo Prajudi, 1979. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Gunung Agung. Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono. 1972. *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembahanjan Sistem Kepenjaraan Dan Pembinaan Narapidana*. Alumni. Bandung.
- F. Susanto Anthon. 2004. *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas PradiIan Pidana*. Refika Aditama. Bandung.
- Gunakaya A.Widiada. 1988 *Sejarah dan Konsep Pemasarakatan*. Armico. Bandung.
- _____ 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi 1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesi.*, Akademika Pressindo. Jakarta.
- _____, 2000. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika . Jakarta
- Hanitijo Sumitro Ronny. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetn*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

- Harsono CI.. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan Jakarta.
- Kasim, Azhar .1993.*Pengukuran Efektivitas Dalam Organisasi*, Fakultas Ekonorni Universitas Indonesia. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid III Edisi Ketiga*,Toko Gunung Agung, Jakarta.
- _____ 1997.*Sistem Administrasi Negara RI, Gunung Agung*, Jakarta.
- _____ 2007. *Sistem Administrasi Negara*
- Lamintang PAF. 1984. *Hukum Penitensier Di Indonesia*. Armico Bandung.
- Marpaung Leden. 2005.*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta,
- Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- _____ . 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung.
- _____ 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Poernomo Bambang. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta,1986.
- Priyatno,Dwidja. 2006. *Sistem Pe!aksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.

- Reksodiputro Mardjono, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia*. Jakarta.
- Rukmini Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Sujatno Adi, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jakarta.
- Sudirman Didin. 2006. *Masalah-Masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta.
- Samosir Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- _____ 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta'.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung 1984.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Suwandi. 2004. *Instrumen Penegakan HAM Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung,
- Van Bemmelen. 1984. *Hukum Pidana I*. Bina Cipta. Bandung.

B. PERUNDANG – UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI .

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI nomor : M.HH-07.PK.01.05.04 tanggal 16 November 2011 Tentang Moratorium Terhadap Tindak Pelaku Pidana Korupsi.

C. SUMBER LAIN – LAIN

Pengembangan Pendekatan Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu
Pemikiran awal, majalah hukum nasional, BPHN, No.2

<http://www.detiknews.com/read/2011/11/03/044659/1758902/10>

<http://www.pelitaonline.com/read/hukum-dan-kriminalitas/nasional>

[www. Hukum online.com](http://www.hukumonline.com)

[www. Legalitas.com](http://www.legalitas.com)